



## Analisis Literasi Keuangan dan Kebijakan Pemerintah Terhadap Kinerja UMKM di Kota Depok

Elmira Siska <sup>1\*</sup>, Purwatiningsih <sup>2</sup>, Hasanudin <sup>3</sup>, Haliza Nur Ramadina <sup>4</sup>, Desi Marlina <sup>4</sup>

<sup>1,2</sup> Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen, Universitas Bina Sarana Informatika, DKI Jakarta, Indonesia

<sup>3,4,5</sup> Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen, Universitas Bina Sarana Informatika, DKI Jakarta, Indonesia

Email: <sup>1\*</sup> [elmira.ems@bsi.ac.id](mailto:elmira.ems@bsi.ac.id), <sup>2</sup> [purwatiningsih.pwt@bsi.ac.id](mailto:purwatiningsih.pwt@bsi.ac.id), <sup>3</sup> [hasanudin.hnu@bsi.ac.id](mailto:hasanudin.hnu@bsi.ac.id), <sup>4</sup> [hnr9637@gmail.com](mailto:hnr9637@gmail.com), <sup>5</sup> [marlinad49@gmail.com](mailto:marlinad49@gmail.com)

Alamat: Jl. Kramat Raya No. 98, Kwitang, Kec. Senen, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia

Korespondensi penulis: [elmira.ems@bsi.ac.id](mailto:elmira.ems@bsi.ac.id)

**Abstract.** MSMEs play a crucial role in the economy. However, the performance of MSMEs is often not optimal due to various challenges, such as limited access to financing, lack of financial literacy, and high dependence on government policies. This study aims to analyze the effect of financial literacy and government policies on the performance of MSMEs in Depok City. A quantitative research design was applied in this study. Primary data were obtained from the results of a questionnaire distributed to 100 selected MSME actors using the accidental sampling method. Data collection was carried out in August - September 2024. Data analysis used the Smart Partial Last Square (PLS) 4 program which includes measuring the outer model and inner model. In testing the outer model, convergent validity, discriminant validity, and composite reliability tests were carried out. In testing the inner model, an evaluation was carried out on multicollinearity, R-squared, goodness of fit, F Square, and path coefficients. The results of the study showed that both financial literacy and government policies had a positive effect on MSME performance, but were not statistically significant. The results of this study imply that financial literacy and government policies need to be improved in terms of implementation and relevance to provide a more tangible impact on MSME performance. Financial literacy programs and policies need to be more tailored to the specific needs of MSMEs and supported by ongoing support to have a significant impact.

**Keywords:** Financial Literacy, Government Policy, Government Programs, MSME Performance

**Abstrak.** UMKM mempunyai peran krusial dalam ekonomi. Walaupun demikian, kinerja UMKM seringkali belum optimal akibat berbagai tantangan, seperti keterbatasan akses terhadap pembiayaan, kurangnya literasi keuangan, dan ketergantungan yang tinggi pada kebijakan pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh literasi keuangan dan kebijakan pemerintah terhadap kinerja UMKM di kota Depok. *Research design* pada penelitian ini adalah kuantitatif. Data primer diperoleh dari hasil kuesioner yang disebarkan kepada 100 pelaku UMKM yang dipilih dengan menggunakan metode *accidental sampling*. Pengumpulan data dilakukan pada bulan Agustus – September 2024. Analisis data menggunakan program Smart Partial Last Square (PLS) 4 yang mencakup pengukuran outer model inner model. Pada pengujian outer model dilakukan uji convergent validity, discriminant validity, dan reliabilitas komposit. Pada pengujian inner model dilakukan evaluasi terhadap multikolenieritas, R-squared, goodness of fit, F Square, dan path koefisien. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, baik literasi keuangan maupun kebijakan pemerintah berpengaruh positif terhadap kinerja UMKM, tetapi tidak signifikan secara statistik. Hasil penelitian ini mengimplikasikan bahwa literasi keuangan dan kebijakan pemerintah perlu ditingkatkan dalam hal implementasi dan relevansi untuk memberikan dampak yang lebih nyata terhadap kinerja UMKM. Program literasi keuangan dan kebijakan perlu lebih disesuaikan dengan kebutuhan spesifik UMKM serta didukung oleh dukungan berkelanjutan agar berdampak signifikan.

**Kata kunci:** Kebijakan Pemerintah, Kinerja UMKM, Literasi Keuangan. Program Pemerintah

### 1. LATAR BELAKANG

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memegang peranan penting dalam perekonomian suatu negara, termasuk Indonesia (Bayraktar & Algan, 2019); (Putri, 2020); (Siska et al., 2022) . Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM tahun

2023, UMKM menyumbang sekitar 61,97% dari total PDB nasional. Nilai ini terus meningkat seiring dengan pertumbuhan sektor usaha kecil dan menengah di berbagai daerah. Selain itu, UMKM juga menjadi penyerap tenaga kerja terbesar di Indonesia, yaitu sekitar 97% dari total tenaga kerja nasional. Menurut data BPS (Badan Pusat Statistik) tahun 2023, lebih dari 120 juta orang bekerja di sektor UMKM, menjadikan UMKM sebagai pilar utama dalam menciptakan lapangan kerja (BPS, 2023).

Walaupun mempunyai peran yang krusial dalam ekonomi, kinerja UMKM seringkali tidak optimal akibat berbagai tantangan yang dihadapi, seperti keterbatasan akses terhadap pembiayaan, kurangnya literasi keuangan, dan ketergantungan yang tinggi pada kebijakan pemerintah. Literasi keuangan menjadi aspek krusial karena kemampuan mengelola keuangan dengan baik berdampak langsung pada keberlanjutan usaha (Widiarti, 2022); (Kusumawati & Putri, 2023). Selain itu, kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, mempengaruhi perkembangan dan pertumbuhan UMKM (Yadewani et al., 2024). Di tengah perubahan kebijakan yang terus berkembang, pelaku UMKM sering kali menghadapi kesulitan dalam menavigasi berbagai regulasi dan memanfaatkan program bantuan yang disediakan oleh pemerintah.

Perkembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota Depok selama empat tahun terakhir menunjukkan tren yang dinamis, terutama dalam menghadapi berbagai tantangan seperti pandemi COVID-19 serta upaya pemulihan ekonomi. Dalam empat tahun terakhir, jumlah UMKM di Kota Depok terus bertambah. Berdasarkan data Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Depok, jumlah UMKM meningkat secara signifikan. Pada tahun 2020, terdapat sekitar 18.000 UMKM yang terdaftar di Kota Depok. Hingga tahun 2023, jumlah UMKM meningkat menjadi lebih dari 22.000 unit usaha, sebagian besar bergerak di sektor perdagangan, kuliner, jasa, serta industri kreatif (BPS, 2022). Sektor kuliner dan perdagangan masih mendominasi komposisi UMKM di Depok, mengingat tingginya permintaan dari konsumen lokal dan wilayah sekitarnya, termasuk Bogor, Jakarta, dan Bekasi. Sektor industri kreatif dan jasa digital juga mulai tumbuh pesat, terutama di kalangan pengusaha muda.

Sementara itu, Kota Depok memiliki sejumlah program yang mendukung pengembangan UMKM, seperti pelatihan kewirausahaan, akses pembiayaan melalui koperasi, serta berbagai kebijakan fiskal untuk memperkuat kapasitas UMKM lokal. Namun, tantangan masih tetap ada dalam hal efektivitas implementasi kebijakan tersebut, terutama dalam hal pemanfaatan program oleh UMKM yang ada. Oleh karena

itu, perlu dilakukan kajian mengenai literasi keuangan dan peran kebijakan pemerintah terhadap kinerja UMKM di Kota Depok.

Penelitian terkait literasi keuangan menunjukkan bahwa pemahaman tentang konsep keuangan dasar sangat mempengaruhi pengambilan keputusan bisnis. Studi oleh (Lusardi & Mitchell, 2014); (Khan et al., 2022); (Sari & Widodo, 2022) menegaskan bahwa individu yang memiliki literasi keuangan yang baik cenderung lebih mampu mengelola arus kas dan mengambil keputusan investasi yang lebih bijak, yang pada akhirnya berdampak positif pada performa bisnis. Di Indonesia, literasi keuangan masih tergolong rendah, terutama di kalangan pelaku UMKM. Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 2022 mencatat bahwa indeks literasi keuangan Indonesia hanya mencapai 49,68%, sementara indeks inklusi keuangan mencapai 85,10% (OJK, 2022). Hal ini menunjukkan bahwa meskipun akses terhadap produk keuangan semakin meningkat, pemahaman yang mendalam tentang pengelolaan keuangan masih terbatas.

Sementara itu, penelitian terkait kebijakan pemerintah terhadap UMKM juga menunjukkan peran penting pemerintah dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan UMKM. Kebijakan fiskal seperti pengurangan pajak, akses pembiayaan yang lebih mudah, serta penyediaan pelatihan kewirausahaan merupakan beberapa intervensi yang efektif dalam mendorong perkembangan UMKM. Studi oleh (Nirmala et al., 2023) menyatakan bahwa kebijakan pemerintah yang berpihak pada UMKM dapat mendorong akselerasi pertumbuhan usaha, terutama di sektor mikro. Namun, efektivitas kebijakan ini bergantung pada sejauh mana kebijakan tersebut dapat diakses dan dimanfaatkan oleh pelaku usaha.

Dalam konteks Kota Depok, sejumlah penelitian menyebutkan bahwa kebijakan pemerintah daerah telah berusaha untuk memberdayakan UMKM melalui berbagai program bantuan dan pelatihan. Namun, implementasi kebijakan tersebut masih sering menemui kendala, seperti kurangnya informasi di tingkat pelaku usaha atau birokrasi yang terlalu rumit.

Meskipun sudah banyak penelitian yang membahas tentang literasi keuangan dan kebijakan pemerintah terhadap kinerja UMKM, masih terdapat gap dalam konteks lokal seperti Kota Depok. Sebagian besar penelitian yang ada berfokus pada daerah lain atau membahas variabel secara terpisah tanpa melihat interaksi antara literasi keuangan dan kebijakan pemerintah.

Kebaruan dalam penelitian ini terletak pada analisis holistik yang menggabungkan dua faktor penting, yaitu literasi keuangan dan kebijakan pemerintah, serta bagaimana keduanya mempengaruhi kinerja UMKM di Kota Depok. Selain itu, penelitian ini berusaha untuk melihat apakah kebijakan pemerintah dapat memoderasi hubungan antara literasi keuangan dan kinerja UMKM, yang belum banyak dibahas dalam penelitian sebelumnya. Urgensi penelitian ini juga didorong oleh kondisi ekonomi pasca-pandemi COVID-19, di mana banyak UMKM yang terdampak secara signifikan dan membutuhkan intervensi khusus untuk bisa pulih dan bertumbuh. Pemerintah pusat maupun daerah telah mengeluarkan berbagai kebijakan pemulihan ekonomi yang khusus menyoar UMKM. Namun, belum ada kajian empiris yang mendalam mengenai sejauh mana kebijakan ini telah membantu meningkatkan literasi keuangan pelaku UMKM dan bagaimana dampaknya terhadap kinerja usaha mereka. Penelitian ini mempunyai dua tujuan. Pertama, untuk mengetahui pengaruh literasi keuangan terhadap kinerja UMKM di kota Depok. Kedua, untuk mengetahui pengaruh kebijakan pemerintah terhadap kinerja UMKM di kota Depok

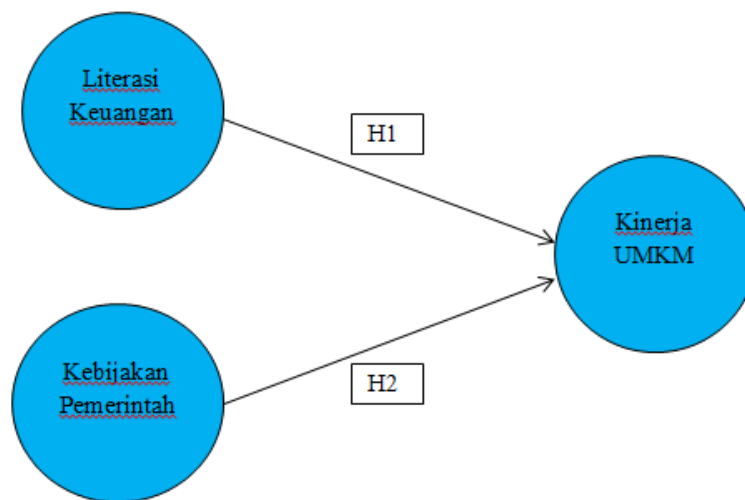
## **2. KAJIAN TEORITIS**

Kinerja UMKM merupakan indikator utama untuk mengukur keberhasilan dan efektivitas operasional usaha mikro, kecil, dan menengah dalam mencapai tujuan usahanya. Secara umum, kinerja UMKM dapat diukur dari beberapa dimensi seperti peningkatan omzet penjualan, laba bersih, pertumbuhan aset, serta perluasan pasar. Penelitian oleh (Mulyanti & Nurhayati, 2022) menjelaskan bahwa kinerja UMKM tidak hanya bergantung pada aspek finansial, tetapi juga pada efisiensi operasional, inovasi produk, dan strategi pemasaran yang diterapkan. Lebih jauh, kinerja UMKM sering kali dipengaruhi oleh kemampuan manajerial pelaku usaha dalam mengelola sumber daya yang terbatas untuk mencapai tujuan bisnis yang berkelanjutan.

Dalam konteks literasi keuangan, beberapa studi menunjukkan bahwa tingkat literasi keuangan berperan penting dalam meningkatkan kinerja UMKM. Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Widjanarko et al., 2022), pelaku UMKM yang memiliki literasi keuangan yang lebih baik cenderung mampu mengelola keuangan dengan lebih bijak, termasuk dalam pengambilan keputusan investasi, manajemen arus kas, serta akses terhadap modal. Dengan pemahaman yang baik tentang pengelolaan risiko dan pengalokasian modal, UMKM mampu bertahan lebih lama dan menghadapi tantangan ekonomi yang lebih kompleks, sehingga kinerja usaha meningkat. Literasi

keuangan membantu pelaku UMKM untuk mengoptimalkan keuntungan serta memitigasi potensi kerugian yang dapat mempengaruhi stabilitas usaha mereka.

Selain itu, kinerja UMKM juga sangat dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah dan lingkungan eksternal. Menurut (Utomo et al., 2024), intervensi kebijakan seperti penyediaan akses pembiayaan, insentif pajak, dan program pelatihan sangat efektif dalam mendorong pertumbuhan UMKM. Namun, efektivitas kebijakan tersebut tergantung pada sejauh mana kebijakan tersebut dapat diakses dan dimanfaatkan oleh pelaku UMKM. Misalnya, program pemulihan ekonomi pasca-pandemi yang diberikan kepada UMKM telah membantu banyak pelaku usaha untuk bangkit dari krisis, sehingga kinerja usaha mereka dapat dipulihkan (Sutrisno, 2021). Dukungan dari pemerintah dalam bentuk penyediaan fasilitas infrastruktur dan teknologi juga mampu mempercepat peningkatan daya saing UMKM di pasar domestik maupun internasional (Nurdianti et al., 2024). Hubungan literasi keuangan, kebijakan pemerintah, dan kinerja UMKM disajikan dalam sebuah *framework* penelitian sebagaimana terlihat pada Gambar 1



**Gambar 1.** Framework Penelitian

Hipotesis penelitian dirumuskan sebagai berikut:

H1: Literasi keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja UMKM di Kota Depok.

H2: Kebijakan pemerintah pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja UMKM di Kota Depok.

### 3. METODE PENELITIAN

Desain penelitian ini menerapkan *research design* kuantitatif. Variabel independen penelitian adalah literasi keuangan (X1) dan kebijakan pemerintah (X2). Sedangkan variabel dependen adalah kinerja UMKM (Y). Data primer yang digunakan berupa kuesioner yang disebar 100 kepada pelaku UMKM di Kota Depok yang dipilih memakai metode *accidental sampling*. Pengumpulan data dilakukan pada bulan Agustus – September 2024. Analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah pendekatan regresi dengan program Smart Partial Last Square (PLS) 4. Analisis PLS-SEM terdiri dari dua sub model yaitu model pengukuran outer model inner model. Pada pengujian outer model dilakukan uji convergent validity, discriminant validity, dan reliabilitas komposit. Pada Pengujian inner model dilakukan evaluasi terhadap multikolenieritas, R-squared, goodness of fit, F Square, dan path koefisien.

### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### a. Karakteristik Responden

Responden penelitian sebagian besar berjenis kelamin perempuan (63%), berusia 30-40 tahun (56%). Mayoritas responden berpendidikan SMA (49%). Jenis usaha responden sebagian besar adalah kuliner (74%). Umumnya usaha yang dijalankan berusia kurang dari 5 tahun (81%) dengan pendapatan tahunan kurang dari Rp500 juta (88%). Profil responden dalam penelitian ini disajikan pada Tabel 1.

**Tabel 1.** Karakteristik Reponden

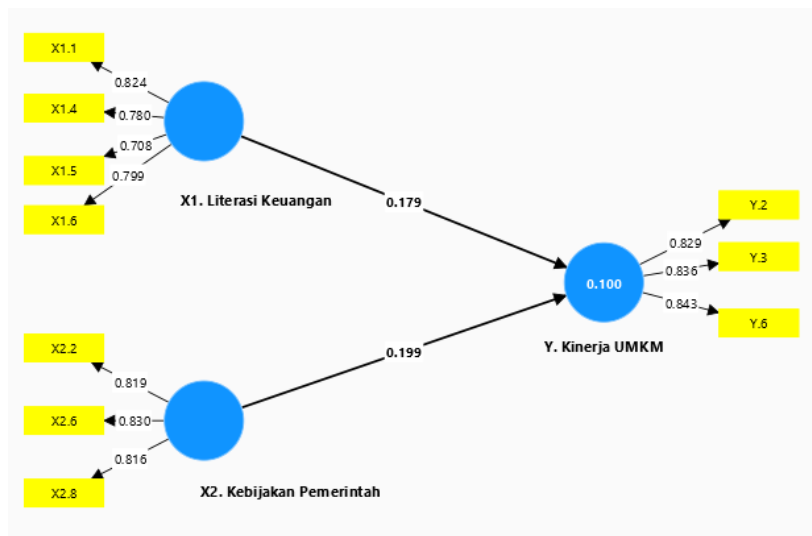
Karakteristik	Keterangan	Frekuensi
Jenis Kelamin	Laki-laki	37
	Perempuan	63
Usia	<30	24
	30-40	56
	>40	20
Pendidikan	SMP	3
	SMA	49
	Diploma 1/2/3	38
	Sarjana	10
Lama usaha	< 5 tahun	81
	5-10 tahun	14
	>10 tahun	5
Income/year	<Rp500 juta	88
	Rp 500 juta - Rp 1 milyar	12
Jenis Usaha	Kuliner	74
	Perdagangan ritel	20
	Tekstil dan pakaian	6

**b. Analysis Outer Model**

**1) Convergent validity**

**a) Loading Factor**

Validitas konvergen digunakan untuk mengetahui validitas setiap indikator terhadap konstruknya. . Pada software SmartPLS 4 untuk melihat hasil dari validitas maka dapat dilihat pada tabel *outer loading*. Nilai untuk indikator dikatakan valid, apabila indikator menjelaskan varibel konstruknya dengan nilai > 0,7,(Hair, Hult, Ringle, & Sarstedt, 2014). Sedangkan nilai item yang dibawah < 0,7 akan dieliminasi. Hasil dari nilai *outer loading* setelah melalui proses eliminasi terhadap indikator dengan nilai < 0,7 dapat dilihat pada Gambar 2 dan Tabel 2.



**Gambar 2.** Modal Struktural

**Table 2.** Nilai Outer Loading

	<b>X1. Literasi Keuangan</b>	<b>X2. Kebijakan Pemerintah</b>	<b>Y. Kinerja UMKM</b>
X1.1	0.824		
X1.4	0.780		
X1.5	0.708		
X1.6	0.799		
X2.2		0.819	
X2.6		0.830	
X2.8		0.816	
Y.2			0.829
Y.3			0.836
Y.6			0.843

Pada Tabel 2 terlihat nilai *outer loading* lebih dari 0,7 yang berarti validitas *convergent* berdasarkan *loading factor* sudah terpenuhi. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa semua indikator sudah valid.

## b) AVE

Validitas konvergen juga dilihat dari nilai Average Variance Extracted (AVE) dengan ketentuan bahwa jika nilai AVE lebih besar dari 0,5, maka dapat dikatakan valid jika (Chin and Dibbern, 2010).

**Table 3.** Average Variance Extracted (AVE)

	Average Variance Extracted (AVE)
X1. Literasi Keuangan	0.607
X2. Kebijakan Pemerintah	0.676
Y. Kinerja UMKM	0.699

Pada Tabel 3 terlihat bawah nilai AVE untuk setiap variable besar dari 0.5. Dengan demikian dapat dikatakan validitas convergent berdasarkan AVE sudah terpenuhi.

## 2) Validitas Diskriminan

Validitas diskriminan adalah tingkat diferensi suatu indikator dalam mengukur konstruk instrumen. Untuk pemodelan persamaan struktural berbasis varian, seperti kriteria evaluasi nilai HTMT, Fornell-Larcker dan pemeriksaan cross-loading adalah pendekatan yang umum untuk mengevaluasi validitas diskriminan.

### a) HTMT

Salah satu metode yang digunakan untuk mengevaluasi validitas diskriminan adalah dengan menggunakan Heterotrait-Monotrait Ratio of Correlations (HTMT). Apabila Nilai HTMT < 0,90 menunjukkan bahwa validitas diskriminan tercapai, yang berarti konstruk laten saling berbeda secara signifikan.

**Table 4.** Nilai HTMT

	X1. Literasi Keuangan	X2. Kebijakan Pemerintah	Y. Kinerja UMKM
X1. Literasi Keuangan			
X2. Kebijakan Pemerintah	0.505		
Y. Kinerja UMKM	0.305	0.399	

Pada Tabel 4 terlihat bawah nilai HTMT untuk setiap variable kecil dari 0.9. Dengan demikian dapat dikatakan validitas diskriminasi berdasarkan nilai HTMT sudah terpenuhi.

### b) Pemeriksaan cross-loading

Untuk menguji diskriminan dapat dilakukan dengan pemeriksaan cross-loading yaitu koefisien korelasi indikator terhadap konstruk asosiasinya (cross-



loading) dibandingkan dengan koefisien korelasi dengan konstruk lain (cross-loading). Nilai konstruk korelasi indikator harus lebih besar terhadap konstruk asosiasinya daripada konstruk lain. Nilai yang lebih besar tersebut mengindikasikan kecocokan suatu indikator untuk menjelaskan konstruk asosiasinya dibandingkan menjelaskan konstruk-konstruk yang lain. Hasil cross-loading factor dari pengujian validitas diskriminan dari dilihat pada Tabel 5.

**Table 5.** Cross Loadings

	<b>X1. Literasi Keuangan</b>	<b>X2. Kebijakan Pemerintah</b>	<b>Y. Kinerja UMKM</b>
X1.1	0.824	0.320	0.242
X1.4	0.780	0.228	0.220
X1.5	0.708	0.267	0.120
X1.6	0.799	0.436	0.187
X2.2	0.271	0.819	0.207
X2.6	0.311	0.830	0.193
X2.8	0.385	0.816	0.257
Y.2	0.183	0.190	0.829
Y.3	0.267	0.246	0.836
Y.6	0.184	0.235	0.843

Hasil pada Tabel 5 menunjukkan bahwa indikator konstruk lebih tinggi dibandingkan dengan korelasi indikator pada konstruk lainnya. Dapat disimpulkan bahwa semua konstruk sudah memiliki validitas diskriminan yang valid.

### c) **Fornier-Larcker**

Pada pengujian kriteria Fornell-Larcker, validitas diskriminan dapat dikatakan baik jika akar dari AVE pada konstruk lebih tinggi dibandingkan dengan korelasi konstruk dengan variabel laten lainnya.

**Table 6.** Nilai Akar Kuadrat AVE

	<b>X1. Literasi Keuangan</b>	<b>X2. Kebijakan Pemerintah</b>	<b>Y. Kinerja UMKM</b>
X1. Literasi Keuangan	0.779		
X2. Kebijakan Pemerintah	0.398	0.822	
Y. Kinerja UMKM	0.298	0.271	0.836

Hasil pemeriksaan pada Tabel 6 menunjukkan bahwa nilai akar kuadrat AVE lebih besar dari nilai korelasi antar konstruknya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa indikator konstruk dalam penelitian ini sudah memiliki validitas diskriminan yang baik.

### 3) Uji Reabilitas

Pada pengujian reliabilitas, jika total nilai *composite reliability* yang dimiliki dari data tersebut lebih dari 0,7 maka dapat dianggap *reliable*. Selain *composite reliability*, reliabilitas juga dapat dikonfirmasi dari nilai *Cronbach Alpha* yang lebih dari 0,60. Hasil uji reliabilitas dapat dilihat pada Tabel 7.

**Table 7.** Uji Reliabilitas

	<i>Composite Reliability (rho-c)</i>	<i>Cronbach Alpha</i>
X1. Literasi Keuangan	0.814	0.790
X2. Kebijakan Pemerintah	0.772	0.763
Y. Kinerja UMKM	0.800	0.787

Berdasarkan hasil pada Tabel 7, dapat dilihat bahwa nilai *composite reliability* dan *Cronbach Alpha* untuk setiap konstruk bernilai  $> 0.6$ . Dengan demikian dapat dikatakan bahwa variable *reliable*.

#### c. Analisis Inner Model

Model struktural atau inner model digunakan untuk memperkirakan hubungan sebab-akibat antara variabel laten, yakni variabel yang tidak dapat diukur secara langsung. Inner model ini menggambarkan bagaimana hubungan kausal antar variabel laten terjalin, yang didasarkan pada teori dasar yang mendasari penelitian tersebut.

#### 1) Uji Mutikolinieritas

Uji Multikolinearitas dilakukan untuk mengevaluasi dan mendeteksi apakah terdapat korelasi yang sangat tinggi atau sempurna antara variabel independen dalam suatu model regresi. Tujuannya adalah memastikan bahwa antar variabel bebas tidak saling mempengaruhi secara signifikan, sehingga hasil analisis regresi akurat. Indikator yang digunakan untuk uji multolenieritas adalah nilai VIF kurang dari 5. Hasil uji multikolinieritas dapat dilihat pada Tabel 8.

**Table 8.** Uji Multikolinieritas

	<b>VIF</b>
X1.1	1.571
X1.4	1.451
X1.5	1.605
X1.6	1.761
X2.2	1.746
X2.6	1.835
X2.8	1.351
Y.2	1.859
Y.3	1.448
Y.6	1.852

Berdasarkan hasil pada Tabel 8, terlihat bahwa nilai VIF untuk seluruh indikator lebih kecil dari 5, maka dinyatakan tidak terjadi multikolinearitas.

## 2) R-Square ( $R^2$ )

Pengujian koefisien determinasi ( $R^2$ ) dilakukan untuk mengukur kemampuan model dalam menerangkan seberapa pengaruh variabel independen secara bersama-sama (stimultan) mempengaruhi variabel dependen yang dapat diindikasikan oleh nilai adjusted R-Squared. Nilai koefisien determinasi yaitu antara 0 dan 1. Jika nilai mendekati 1, artinya variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen. Namun, jika nilainya  $R^2$  semakin kecil, artinya kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen cukup terbatas. Hasil uji *R-Square* dapat dilihat pada Tabel 9.

**Tabel 9.** R- Uji *R-Square*

	<i>R-Square</i>	<i>R-Square adjusted</i>
Y. Kinerja UMKM	0.100	0.082

Berdasarkan hasil perhitungan nilai R-Square adjusted dapat diartikan bahwa variabel literasi keuangan dan kebijakan pemerintah mampu menjelaskan konstruk variabel kinerja UMKM adalah lemah yaitu sebesar 0,082 (8,02%).

## 3) Goodness of Fit

Pemeriksaan nilai indeks SRMR adalah untuk mengetahui rata-rata dari semua perbedaan diantara data yang diuji dan model yang secara tidak langsung berkorelasi. Model persamaan struktural dapat dikatakan fit jika nilai SRMR < 0,10 dan model dinyatakan tidak layak jika nilai SRMR > 0,15. Hasil SRMR dapat dilihat pada Tabel 10.

**Tabel 10.** SRMR

	Saturated Model	Estimated Model
SRMR	0.085	0.085

Berdasarkan nilai SRMR pada Table 10, maka dapat dikatakan model fit.

## 4) F Square

*F-Square* dapat dikatakan memiliki kegunaan untuk mengetahui pengaruh variabel eksogen terhadap variabel endogen. Terdapat beberapa pernyataan dari *F-Square*, dikatakan lemah 0.02, moderat 0.15, dan kuat 0.35 (Hair et al, 2012). *F-Square* disajikan pada Tabel 11.

**Tabel 11. F-Square**

	<b>Y. Kinerja UMKM</b>
X1. Literasi Keuangan	0.030
X2. Kenijakan Pemerintah	0.037

Berdasarkan hasil pada Tabel 11, maka dapat disimpulkan bahwa literasi keuangan dan kebijakan pemerintah dalam menjelaskan kinerja UMKM adalah lemah.

### 5) Path Koefisien

Pengujian hipotesis dilakukan untuk menunjukkan ada atau tidaknya pengaruh antar variabel pada sebuah penelitian. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan nilai t-statistik, dengan ketentuan untuk nilai t-statistik yang digunakan adalah  $> 1,96$ . Pengujian hipotesis dilakukan dengan melihat *output path coefficient* dari hasil *resampling bootstrapping*. Jika t-statistik lebih besar dari 1.96 dan  $P Value < 0.05$ , maka hipotesis diterima. Path koefisien disajikan pada Tabel 12.

**Tabel 12. Path Coefficients**

	<b>Original Sample</b>	<b>Sample Mean</b>	<b>Std. Deviation</b>	<b>t Statistics</b>	<b>P Value</b>
Literasi Keuangan -> Kinerja Keuangan	0.179	0.202	0.111	1.618	0.106
Kebijakan Pemeritnah -> Kinerja Keuangan	0.199	0.222	0.103	1.926	0.054

Berdasarkan hasil pada Tabel 12, nilai t statistik variable literasi keuangan 1.618  $< t$  table 1.96 dan nilai p value 0.106  $> 0.05$ , sehingga hipotesis 1 ditolak. Hal ini berarti bahwa literasi keuangan berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap terhadap kinerja UMKM di kota Depok. Nilai t statistik variable kebijakan pemerintah 1.926  $< t$  table 1.96 dan p value 0.054  $> 0,05$ , maka hipotesis 2 ditolak. Hal ini berarti bahwa kebijakan pemerintah tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja UMKM di kota Depok.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa literasi keuangan berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap kinerja UMKM di Kota Depok. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa alasan berikut. Pertama, meskipun literasi keuangan memberikan manfaat potensial bagi pelaku usaha, seperti pemahaman yang lebih baik tentang pengelolaan arus kas dan

perencanaan investasi, tingkat penerapannya di lapangan mungkin masih rendah. Banyak pelaku UMKM yang memiliki pengetahuan dasar tentang keuangan tetapi tidak selalu mengaplikasikan keterampilan tersebut secara konsisten dalam operasi bisnis mereka sehari-hari. Sebagai contoh, survei OJK pada tahun 2022 mengungkapkan bahwa tingkat literasi keuangan di Indonesia masih berada pada angka 49,68%, sementara tingkat inklusi keuangan lebih tinggi, yaitu 85,10%, yang mengindikasikan adanya kesenjangan antara pemahaman dan penerapan.

Kedua, literasi keuangan yang dimiliki oleh pelaku UMKM mungkin belum mampu mengatasi tantangan operasional yang lebih kompleks. Pelaku UMKM di Depok sering kali menghadapi masalah yang lebih mendasar, seperti keterbatasan akses pasar, kendala distribusi, atau minimnya inovasi produk (Sedyastuti, 2018). Faktor-faktor ini lebih mendominasi dalam mempengaruhi kinerja usaha, sehingga meskipun literasi keuangan membantu, kontribusinya menjadi kurang signifikan dibandingkan faktor-faktor eksternal lainnya. Sebuah studi oleh (Dhamayantie & Fauzan, 2018) menekankan bahwa di banyak daerah, tantangan struktural dan lingkungan bisnis lebih memengaruhi kinerja UMKM daripada kapasitas keuangan pelaku usaha.

Ketiga, ada kemungkinan bahwa pelaku UMKM di Kota Depok lebih mengandalkan sumber daya informal dalam mengelola keuangan mereka, seperti modal dari keluarga atau teman, sehingga kemampuan manajemen keuangan yang lebih formal tidak terlalu berperan. Ini didukung oleh data yang menunjukkan bahwa UMKM di Indonesia, termasuk di Depok, sering kali kesulitan mengakses pembiayaan dari lembaga keuangan formal. Menurut survei dari Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2023, hanya sekitar 20% UMKM yang mendapatkan pembiayaan dari bank atau lembaga keuangan formal, sementara sisanya mengandalkan sumber pendanaan non-formal. Hal ini mengurangi relevansi literasi keuangan dalam konteks operasional UMKM di Depok.

Keempat, meskipun literasi keuangan memberikan dampak positif dalam jangka panjang, hasilnya mungkin tidak langsung terlihat dalam periode waktu penelitian yang relatif pendek. Literasi keuangan cenderung menghasilkan keputusan bisnis yang lebih baik dalam jangka waktu yang lebih lama, seperti meningkatkan efisiensi, mengurangi risiko, atau memperluas skala usaha. Namun, untuk dapat melihat dampak yang signifikan terhadap kinerja UMKM, diperlukan waktu yang lebih lama dan upaya berkelanjutan dalam meningkatkan literasi keuangan. Studi oleh Lusardi dan Mitchell (2014) menyatakan bahwa literasi keuangan memiliki efek kumulatif, yang artinya, hasil nyata dari penerapannya baru

dapat dirasakan setelah beberapa waktu, sejalan dengan perbaikan perilaku pengelolaan keuangan yang konsisten.

Kemudian, hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap kinerja UMKM di Kota Depok. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa alasan berikut. Pertama, Pertama, meskipun pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan yang mendukung UMKM, implementasinya di lapangan sering kali tidak optimal. Banyak pelaku UMKM yang tidak memiliki akses yang memadai terhadap program-program pemerintah, baik dalam bentuk pelatihan, pendampingan, maupun bantuan keuangan. Data dari Kementerian Koperasi dan UKM (2023) menunjukkan bahwa meskipun banyak program yang diluncurkan untuk mendukung UMKM, tingkat partisipasi dan pemanfaatan program ini masih relatif rendah, terutama di tingkat daerah. Hal ini dapat disebabkan oleh kurangnya informasi atau keterbatasan dalam birokrasi lokal yang menghambat pelaksanaan kebijakan.

Kedua, kebijakan pemerintah seringkali bersifat top-down dan kurang memperhitungkan kebutuhan spesifik UMKM di daerah seperti Depok. Meskipun ada kebijakan yang bertujuan untuk memperbaiki akses pembiayaan, pelatihan, atau kemudahan perizinan, kebijakan tersebut tidak selalu sesuai dengan realitas dan tantangan yang dihadapi pelaku UMKM di tingkat lokal. Menurut (Utomo et al., 2024), kebijakan yang dirancang secara umum untuk seluruh UMKM di Indonesia sering kali kurang memperhitungkan perbedaan kondisi sosial, ekonomi, dan infrastruktur di berbagai daerah. Ini membuat kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat atau daerah tidak sepenuhnya relevan atau efektif dalam meningkatkan kinerja UMKM di Depok.

Ketiga, ketergantungan pada kebijakan pemerintah sebagai satu-satunya sumber dukungan bagi UMKM juga dapat membatasi pengaruhnya terhadap kinerja usaha. UMKM di Depok mungkin menghadapi tantangan lain yang lebih signifikan, seperti persaingan pasar, akses teknologi, atau inovasi produk, yang tidak dapat sepenuhnya diatasi melalui kebijakan pemerintah. Studi yang dilakukan oleh OECD (2020) menunjukkan bahwa dukungan pemerintah perlu didukung oleh keterlibatan sektor swasta, terutama dalam hal akses ke pasar dan inovasi teknologi, agar dapat memberikan dampak yang lebih signifikan terhadap kinerja UMKM.

Keempat, kebijakan pemerintah yang berfokus pada bantuan finansial dan insentif mungkin memerlukan waktu lebih lama untuk memberikan dampak signifikan terhadap kinerja UMKM. Seperti yang dinyatakan oleh (Utomo et al., 2024), program-program pemerintah seringkali bersifat jangka panjang dan membutuhkan waktu untuk melihat hasil

yang nyata, terutama dalam hal peningkatan produktivitas dan pertumbuhan skala usaha. Oleh karena itu, meskipun kebijakan pemerintah memberikan dampak positif, efeknya terhadap kinerja UMKM di Depok mungkin belum terlihat secara signifikan dalam jangka waktu penelitian ini.

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan dua hal sebagai berikut. Pertama, literasi keuangan berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap kinerja UMKM di Kota Depok. Kedua, kebijakan pemerintah berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap kinerja UMKM di Kota Depok. Implikasi kebijakan dari temuan ini adalah perlunya adanya program literasi keuangan yang lebih berfokus pada aspek praktis, seperti bagaimana mengelola arus kas, akses pembiayaan, serta perencanaan keuangan jangka panjang yang lebih tepat sasaran. Program pelatihan harus lebih intensif dan berkelanjutan, sehingga pelaku UMKM tidak hanya memiliki pengetahuan, tetapi juga mampu mengaplikasikannya dalam konteks bisnis mereka sehari-hari. Secara keseluruhan, temuan ini menyoroti pentingnya pendekatan holistik yang menggabungkan peningkatan literasi keuangan dengan optimalisasi kebijakan pemerintah untuk mendorong kinerja UMKM secara signifikan di Kota Depok.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Yayasan Bina Sarana Informatika dan LPPM Universitas Bina Sarana Informatika atas penetapan pemenang hibah Penelitian Didanai Yayasan (PDY) tahun 2024 berdasarkan surat keputusan No. 139/LPPM-UBSI/VIII/2024, sehingga penelitian dan publikasi ini dapat direalisasikan.

## DAFTAR REFERENSI

- Bayraktar, M., & Algan, N. (2019). The Importance Of SMEs On World Economies. *International Conference on Eurasian Economies 2019*, 2, 56–61. <https://doi.org/10.36880/c11.02265>
- BPS. (2022). *Analisis Ekonomi Kreatif Kota Depok 2022*.
- BPS. (2023). Profil Industri Mikro dan Kecil 2022. *Badan Pusat Statistik*, 13, 258.
- Dhamayantie, E., & Fauzan, R. (2018). Penguatan Karakteristik dan Kompetensi Kewirausahaan Untuk Meningkatkan Kinerja UMKM. *Matrik: Jurnal Manajemen, Strategi Bisnis Dan Kewirausahaan*, 11(1), 80–91.
- Khan, F., Siddiqui, M. A., & Imtiaz, S. (2022). Role of financial literacy in achieving

- financial inclusion: A review, synthesis and research agenda. *Cogent Business and Management*, 9(1). <https://doi.org/10.1080/23311975.2022.2034236>
- Kusumawati, E. D., & Putri, E. (2023). Pengelolaan Keuangan Umkm Ditinjau Dari Literasi Keuangan, Persepsi Keuangan Dan Sikap Keuangan. *Jurnal Akuntansi STIE Muhammadiyah Palopo*, 9(2), 185. <https://doi.org/10.35906/jurakun.v9i2.1567>
- Lusardi, A., & Mitchell, O. S. (2014). The economic importance of financial literacy: Theory and evidence. *Journal of Economic Literature*, 52(1), 5–44. <https://doi.org/10.1257/jel.52.1.5>
- Mulyanti, D., & Nurhayati, A. (2022). Penerapan Literasi Keuangan Dan Penggunaan Financial Technology Untuk Menilai Kinerja Keuangan Umkm Di Jawa Barat. *Ekono Insentif*, 16(2), 63–81. <https://doi.org/10.36787/jei.v16i2.887>
- Nirmala, A. R., Damayanti, U. R., Nurani, R., & Ustha, E. (2023). Akselerasi Peningkatan Kualitas SDM dan Jiwa Kewirausahaan Untuk Meningkatkan Peluang Para Entrepreneur Umkm Pada Pelaku UMKM Di Pekanbaru. *Jurmas Azam Insan Cendikia (Jurnal Pengabdian Masyarakat AIC)*, 2(3), 120–126. <https://embistek.org/jurnal/index.php/aic/>
- Nurdiyanti, D., Elistiana, & Permadi, A. (2024). Upaya Indonesia Meningkatkan Daya Saing UKM dalam Konteks Masyarakat Ekonomi ASEAN pada 2019 – 2022. *Balcony*, 8(1), 41–55.
- OJK. (2022). *2021 – 2025 National Strategy on Indonesian Financial Literacy I*. 1–130.
- Putri, S. (2020). Kontribusi UMKM terhadap Pendapatan Masyarakat Ponorogo: Analisis Ekonomi Islam tentang Strategi Bertahan di Masa Pandemi Covid-19. *EKONOMIKA SYARIAH: Journal of Economic Studies*, 4(2), 147. <https://doi.org/10.30983/es.v4i2.3591>
- Sari, R. W., & Widodo, S. (2022). Pengaruh literasi keuangan, modal manusia, dan financial technology terhadap kinerja UMKM di Kabupaten Sleman. *Eqien-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 11(2), 411–417.
- Sedyastuti, K. (2018). Analisis Pemberdayaan UMKM Dan Peningkatan Daya Saing Dalam Kancan Pasar Global. *INOBISS: Jurnal Inovasi Bisnis Dan Manajemen Indonesia*, 2(1), 117–127. <https://doi.org/10.31842/jurnal-inobis.v2i1.65>
- Siska, E., Lestari, N. E. P., Elvira, L., & Rachmah, S. M. (2022). Pelatihan Ms. Excel untuk Pricing Decisions pada Koperasi UKM Tajurhalang Makmur Bogor di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Indonesia (JPKMI)*, 2(1), 63–72. <https://doi.org/10.55606/jpkmi.v2i1.181>
- Sutrisno, E. (2021). Strategi Pemulihan Ekonomi Pasca Pandemi Melalui Sektor Umkm dan Pariwisata. *Jurnal Lemhannas RI*, 9(1), 167–185. <https://doi.org/10.55960/jlri.v9i1.385>
- Utomo, S. B., Pujowati, Y., & Utami, E. Y. (2024). Analisis Kebijakan Pemerintah, Bantuan Modal, dan Pelatihan Kewirausahaan Terhadap Pertumbuhan Bisnis pada Komunitas UMKM di Jawa Timur. *Jurnal Ekonomi Dan Kewirausahaan West*



*Science*, 2(02), 146–156. <https://doi.org/10.58812/jekws.v2i02.1110>

- Widiarti, T. S. (2022). Peran Inovasi, Literasi Keuangan, Modal Kerja Dan Kebijakan Pemerintah Dalam Upaya Meningkatkan Kinerja UKM. *JMBI UNSRAT (Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis Dan Inovasi Universitas Sam Ratulangi)*, 9(3), 1359–1371. <https://doi.org/10.35794/jmbi.v9i3.44541>
- Widjanarko, W., Wahyu Hidayat, W., Teguh Prasetyo, E., Eprianto, I., & Bhayangkara Jakarta Raya, U. (2022). The Effect of Financial Literacy on the Financial Management of MSMEs in Jatinangor District, Sumedang Regency. *Enrichment: Journal of Management*, 12(5), 3359–3364.
- Yadewani, D., Pandi, O. D., Syafrani, Nurofik, A., & Poddar, S. (2024). Impact of Government Policies on the Knowledge Base of Sustainable Small and Medium-Sized Enterprises. *Jurnal Ilmiah Ilmu Terapan Universitas Jambi*, 8(1), 251–266. <https://doi.org/10.22437/jiituj.v8i1.31884>